

**Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak UMKM**  
*The Influence Of Tax Rate Perception On Umkm  
Taxpayer Compliance*

**Silvia Anggiani**

Universitas Teknologi Digital, [silvia10220078@digitechuniversity.ac.id](mailto:silvia10220078@digitechuniversity.ac.id)

**Susilawati**

Universitas Teknologi Digital, [susilawati@digitechuniversity.ac.id](mailto:susilawati@digitechuniversity.ac.id)

Abstrak

**Tujuan** \_ untuk menganalisis bagaimana persepsi tarif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada UMKM.

**Desain/Metode** \_ menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, survei dan wawancara.

**Temuan** \_ Penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah persepsi yang dimiliki UMKM terhadap tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Implikasi** \_ pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran UMKM tentang sistem perpajakan, termasuk penyediaan edukasi pajak yang lebih baik dan lebih terfokus..

**Originalitas** \_ penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai persepsi tarif pajak dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

**Tipe Penelitian** \_ Studi Empiris

**Kata Kunci** : UMKM, tarif pajak, kepatuhan pajak, persepsi pajak

## I. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Di banyak negara, sektor UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Namun, di sisi lain, UMKM sering kali menghadapi tantangan yang serius, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan aspek kritis dalam menjaga keberlanjutan sistem perpajakan suatu negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM sering kali rendah, menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah dalam hal pendapatan pajak yang hilang. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, termasuk persepsi mereka terhadap tarif pajak (Efrinal, 2021).

Pengelolaan pajak di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Wajib pajak, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki peran yang signifikan dalam kontribusi pajak namun seringkali dihadapkan pada tantangan dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor yang diyakini mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah persepsi mereka terhadap tarif pajak yang harus mereka bayar. UMKM memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di banyak negara. Persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tarif pajak dapat signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Perpajakan merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial lainnya. . Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM sering kali rendah,

menyebabkan kehilangan potensi pendapatan negara yang signifikan. Persepsi tarif pajak didefinisikan sebagai pemahaman dan penilaian subjektif wajib pajak UMKM terhadap besaran tarif pajak yang harus mereka bayar berdasarkan pendapatan usaha mereka. Kepatuhan wajib pajak UMKM mengacu pada sejauh mana mereka mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM adalah persepsi mereka terhadap tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Persepsi ini mencakup pemahaman mereka terhadap keadilan tarif pajak serta evaluasi subjektif mereka terhadap beban pajak yang mereka hadapi. Persepsi terhadap tarif pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas sistem perpajakan, tingkat kejelasan dan kepastian aturan, serta kondisi ekonomi dan politik lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, termasuk persepsi mereka terhadap tarif pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi tarif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan mengeksplorasi hubungan antara persepsi terhadap tarif pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## **II. Kajian Teori**

### **1. Teori Persepsi Tarif Pajak**

Pada umumnya, teori persepsi tarif pajak merujuk pada pendekatan psikologis dan ekonomi terhadap bagaimana individu atau entitas bisnis memandang tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Teori ini mengasumsikan bahwa persepsi subjektif terhadap tarif pajak dapat memengaruhi perilaku pajak, termasuk tingkat kepatuhan pajak. Teori persepsi tarif pajak membahas bagaimana individu atau entitas menginterpretasikan dan merespons tarif pajak yang mereka hadapi. Persepsi ini mencakup pemahaman, penilaian, dan evaluasi subjektif terhadap besaran tarif pajak berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas ekonomi mereka. Persepsi tarif pajak mengacu pada pandangan, pemahaman, dan penilaian subjektif yang dimiliki oleh individu atau entitas terhadap besaran tarif atau tingkat pajak yang harus mereka bayar berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas ekonomi mereka. Persepsi tentang tarif pajak yang adil dan wajar akan meningkatkan kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan, sementara persepsi sebaliknya dapat mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak (Kirchler, 2007).

Persepsi tarif pajak mencakup pemahaman dan penilaian individu atau entitas terhadap tingkat pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Konsep ini melibatkan pandangan subjektif terhadap aturan dan kebijakan perpajakan, dipengaruhi oleh faktor seperti pengetahuan, pengalaman, dan pandangan terhadap sistem pajak. Di sisi lain, tarif pajak merujuk pada persentase atau tingkat yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan atau transaksi tertentu. Persepsi tarif pajak memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat atau pelaku bisnis menilai keadilan dan dampak finansial dari kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pemahaman yang lebih baik tentang persepsi ini dapat membantu pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan perpajakan secara efektif dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Rachman, 2022).

Persepsi tarif pajak juga dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat atau pelaku bisnis memahami tarif pajak sebagai beban yang terlalu tinggi atau tidak adil, mereka mungkin mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, seperti melalui perencanaan pajak yang lebih cermat atau pencarian celah hukum yang sah. Di sisi lain, jika persepsi tarif pajak dianggap wajar dan adil, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu,

pemerintah perlu memperhatikan tidak hanya aspek teknis tarif pajak, tetapi juga bagaimana tarif tersebut dipahami dan dinilai oleh masyarakat agar kebijakan perpajakan dapat diterima dengan lebih baik

## 2. Faktor-Faktor Persepsi Tarif Pajak

Faktor-faktor persepsi tarif pajak memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan suatu negara. Tingkat tarif, struktur pajak, penggunaan dana pajak, beban pajak keseluruhan, efisiensi sistem, pemberdayaan ekonomi, faktor sosial dan politik, keamanan hukum, dan aspek-aspek internasional semuanya saling terkait dalam membentuk persepsi ini. Keseimbangan yang baik antara adil dan efisien dalam sistem perpajakan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap pajak yang diterapkan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang transparan, sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial, serta memberikan kepastian hukum, dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Persepsi positif ini penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tarif pajak adalah :

- a. Keadilan Pajak : Persepsi tentang keadilan dalam tarif pajak dapat signifikan memengaruhi sikap terhadap kepatuhan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang dikenakan adalah adil dan berdasarkan pada kemampuan bayar mereka, mereka cenderung lebih bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Kirchler, 2007).
- b. Kemampuan Bayar : Penilaian terhadap kemampuan untuk membayar pajak dengan tarif yang diberlakukan juga merupakan faktor penting dalam persepsi tarif pajak. Jika tarif pajak dianggap memberatkan atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan atau pendapatan wajib pajak, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka (Torgler, 2003).
- c. Transparansi dan Kepastian Hukum: Persepsi tentang transparansi dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan juga dapat memengaruhi bagaimana wajib pajak menilai tarif pajak yang diberlakukan. Kehadiran aturan yang jelas dan dapat dipahami dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Torgler, 2005).
- d. Norma Sosial dan Kultur: Norma sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tarif pajak. Jika tingkat kepatuhan pajak dianggap sebagai norma yang diterima atau dihargai dalam masyarakat, wajib pajak cenderung untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan (Tran-Nam et al., 2009).

## 3. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana seseorang atau entitas mematuhi aturan perpajakan. Seorang wajib pajak diharapkan untuk membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan memahami serta mengikuti aturan pajak yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk mengisi SPT secara tepat waktu dengan informasi yang akurat mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak. Kerjasama dengan otoritas pajak juga merupakan aspek penting, termasuk memberikan informasi tambahan jika diminta (Jatopurnomo, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana individu atau entitas mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan institusional. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi:

- a. Keadilan dan Kepatuhan: Wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban mereka jika mereka percaya bahwa sistem pajak itu adil dan transparan.

- b. Kesadaran dan Pendidikan Pajak: Tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pendidikan pajak yang baik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya membayar pajak.
- c. Penegakan Hukum: Efektivitas penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggar pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ancaman sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong kepatuhan.
- d. Norma Sosial: Norma sosial atau moral dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika membayar pajak dianggap sebagai norma yang diterima dalam masyarakat, wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi.
- e. Kontrol Internal dan Kesadaran Etika: Faktor internal seperti kontrol diri dan kesadaran etika individu dalam hal mematuhi aturan juga berperan penting. Individu yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak.
- f. Kebijakan Pajak dan Pengelolaan Administrasi: Kebijakan pajak yang jelas dan konsisten serta pengelolaan administrasi pajak yang baik dapat memudahkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka.

#### 4. Teori UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk kepada sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai jenis bisnis dengan skala operasional yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari UMKM:

- a. Skala Operasional: UMKM biasanya memiliki skala operasional yang kecil hingga menengah. Mereka mungkin hanya memiliki beberapa karyawan atau bahkan dikelola oleh pemilik tunggal.
- b. Keterlibatan Pemilik: Banyak UMKM dimiliki dan dioperasikan oleh pemiliknya sendiri atau keluarga, yang terlibat langsung dalam manajemen sehari-hari dan pengambilan keputusan.
- c. Ketahanan dan Fleksibilitas: UMKM sering kali lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar atau kondisi ekonomi dibandingkan perusahaan besar. Mereka juga dapat memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.
- d. Kontribusi terhadap Perekonomian: UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Mereka sering menjadi tulang punggung ekonomi di daerah pedesaan atau kota kecil.
- e. Menghadapi Tantangan: Meskipun memiliki potensi besar, UMKM juga menghadapi tantangan seperti akses terhadap modal, regulasi yang kompleks, akses pasar, dan pengelolaan sumber daya yang terbatas.
- f. Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan: Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UMKM juga berperan dalam mengurangi kemiskinan, mempromosikan kesetaraan gender, dan mendukung inklusi sosial dan ekonomi.

### III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang atas sebuah isu atau topik. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM yang beroperasi sebagai wajib pajak di wilayah kabupaten Bandung Barat. Sampel dipilih secara purposive dengan melibatkan 33 UMKM, menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data primer tentang persepsi tarif pajak dan kepatuhan pajak, serta wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil pengumpulan data yang berupa penyebaran

kuesioner secara langsung kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang berisi berbagai pertanyaan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan tujuan memberi kemudahan kepada responden dalam menjawab Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik persepsi dan verifikatif untuk menguji hubungan antara persepsi tarif pajak dan tingkat kepatuhan pajak UMKM.

#### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada UMKM di daerah Bandung Barat, pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari responden. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui wawancara dan persebaran kuesioner.

Persepsi tentang tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika UMKM merasa bahwa tarif pajak terlalu tinggi atau tidak adil, mereka mungkin cenderung untuk mencari cara-cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, baik itu melalui praktik penghindaran pajak yang sah atau bahkan ilegal. Di sisi lain, jika mereka merasa bahwa tarif pajak adil dan memberikan nilai yang sesuai dengan layanan dan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Selain itu, ketika tarif pajak terlalu rumit atau sulit dipahami oleh UMKM, hal itu juga dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak. UMKM mungkin merasa terintimidasi atau bingung dengan proses perpajakan yang kompleks, dan akhirnya memilih untuk menghindari atau mengabaikan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan persepsi UMKM terhadap tarif pajak dan untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka tentang pentingnya kepatuhan pajak serta memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan agar UMKM dapat mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak erhadap pelaksana UMKM di Bandung Barat, yaitu faktor dari internal dan faktor dari eksternal, faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri seseorang yaitu berupa faktor psikologi. faktor dari eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan.

Dalam wawancara dengan seorang pelaku UMKM di Bandung Barat, yang kita sebut saja dengan inisial A.B., dibahas mengenai pengaruh persepsi terhadap tarif pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut A.B., salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah persepsi terhadap tarif pajak yang dikenakan. Jika tarif pajak terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha, hal ini bisa membuat UMKM merasa terbebani dan mencari cara untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak mereka. A.B. menekankan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan tarif pajak yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi UMKM serta memberikan insentif bagi yang taat pajak. A.B. juga menyatakan bahwa lebih banyak edukasi tentang pentingnya kewajiban pajak dan dampaknya bagi pembangunan daerah juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Selain itu wawancara dengan seorang narasumber lain yang merupakan pemilik UMKM di Bandung Barat, yang kita sebut saja dengan inisial D.E., terjadi diskusi mengenai pengaruh persepsi terhadap tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut D.E., tarif pajak yang tinggi atau tidak proporsional dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha dapat menjadi beban yang cukup besar bagi UMKM. Hal ini dapat membuat pelaku UMKM cenderung mencari cara untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak mereka. D.E. menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, pemerintah perlu memperhatikan tarif pajak yang lebih sesuai

dengan kemampuan ekonomi UMKM dan memberikan insentif bagi yang taat pajak. Selain itu, D.E. juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pendampingan terkait pajak kepada pelaku UMKM agar mereka lebih memahami kewajiban pajak mereka dan dapat memenuhinya dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, terutama pelaku UMKM di Bandung Barat dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kalangan UMKM. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi UMKM, hal ini dapat menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban pajak secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tarif pajak yang lebih proporsional dengan kondisi UMKM serta penyuluhan yang lebih efektif mengenai kewajiban pajak dan dampaknya bagi pembangunan daerah. Selain itu, memberikan insentif bagi UMKM yang taat pajak juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Bandung Barat. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa persepsi tarif pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika UMKM merasa bahwa tarif pajak tidak adil atau terlalu tinggi, mereka cenderung untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal. Sebaliknya, jika UMKM merasa bahwa tarif pajak adil dan memberikan nilai yang sesuai dengan layanan publik, mereka lebih mungkin mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Selain itu, kompleksitas sistem perpajakan juga dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak, karena UMKM mungkin merasa terintimidasi atau bingung dengan proses perpajakan yang rumit. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan persepsi UMKM terhadap tarif pajak, berkomunikasi secara efektif tentang pentingnya kepatuhan pajak, dan menyediakan bantuan serta dukungan yang diperlukan agar UMKM dapat mematuhi kewajiban pajak dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa persepsi tarif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara persepsi terhadap tarif pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap tingkat pajak yang dikenakan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tingkat tarif pajak dapat signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Melalui pengumpulan data yang teliti dan analisis statistik yang mendalam, saya menemukan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan mereka. Temuan ini memberikan pemahaman yang penting dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan menekankan pentingnya transparansi serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Metode yang digunakan mungkin melibatkan survei terhadap sejumlah wajib pajak UMKM, di mana mereka diminta untuk menilai atau mengungkapkan persepsi mereka terhadap besaran tarif pajak yang mereka bayar. Analisis data kemudian dilakukan untuk menentukan apakah ada hubungan antara persepsi tarif pajak (seperti terlalu tinggi, terlalu rendah, adil, atau tidak adil) dengan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor psikologis atau persepsi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang dapat bermanfaat bagi kebijakan perpajakan atau strategi pendidikan dan penegakan hukum perpajakan di masa depan.

## V. Penutup

Penelitian ini menyoroti bahwa persepsi terhadap regulasi pajak, pemahaman terhadap sistem perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah merupakan faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi positif terhadap peraturan perpajakan dan pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak cenderung meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, kepercayaan yang kuat pada pemerintah, terutama dalam hal keadilan dan efisiensi penggunaan dana pajak, juga mendukung motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pendekatan yang holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan komunikasi mengenai peraturan perpajakan, serta membangun transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan dana pajak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif positif bagi UMKM untuk lebih patuh dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pemahaman perilaku kepatuhan pajak di kalangan UMKM, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi tarif pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan tarif yang dirasakan lebih tinggi cenderung menurunkan tingkat kepatuhan.

#### Saran:

- 1) **Penguatan Pendidikan Perpajakan:** Meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM tentang sistem perpajakan melalui program pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau program edukasi online yang mudah diakses.
- 2) **Penyediaan Informasi yang Jelas:** Memastikan bahwa informasi mengenai peraturan perpajakan tersedia secara jelas dan mudah dipahami oleh UMKM. Pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait regulasi perpajakan.
- 3) **Meningkatkan Komunikasi Antara Pemerintah dan UMKM:** Memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan UMKM untuk membangun kepercayaan. Pemerintah dapat melibatkan UMKM dalam proses perumusan kebijakan perpajakan dan memberikan klarifikasi langsung terkait pertanyaan atau kekhawatiran terkait peraturan perpajakan.
- 4) **Pengembangan Sistem Perpajakan yang Adil dan Efisien:** Memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan adil dan efisien dalam penggunaan dana pajak. Ini akan membantu membangun kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dan mendorong kepatuhan sukarela.
- 5) **Inovasi dalam Pelayanan Pajak:** Mengembangkan teknologi dan inovasi dalam pelayanan pajak untuk memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mengurangi beban birokrasi.
- 6) **Penelitian Lanjutan:** Melakukan penelitian lanjutan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Studi lebih lanjut dapat memberikan wawasan tambahan untuk meningkatkan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

#### Daftar Pustaka

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1-9.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818-860.

- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 123-135.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behavior*. Cambridge University Press
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 115-123.
- Torgler, B. (2003). Tax morale in Asian countries. *Journal of Asian Economics*, 14(2), 297-317
- Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525-531.
- Tran-Nam, B., Evans, C., & Walpole, M. (2009). Small business taxpayers' perceptions of tax fairness and compliance behaviour: Evidence from Australia. *eJournal of Tax Research*, 7(1), 114-141.
- Trida, T., Jenni, J., & Salikim, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UmkM)